



RENJA

Rencana Kerja Tahun 2022

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

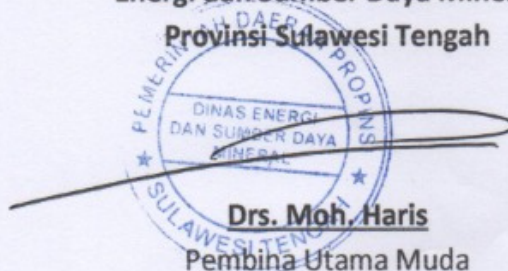
Renja Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan pedoman dan rujukan dalam Menyusun program dan kegiatan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan dalam prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan. Dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Dokumen Renja ini juga dijadikan sarana peningkatan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah dan memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan di masa mendatang oleh para pemimpin dan *stakeholder*.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen renja ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran serta masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan dokumen ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan, khususnya sector energi dan sumber daya mineral di Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, Desember 2021

**Kepala Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sulawesi Tengah**



Drs. Moh. Haris

Pembina Utama Muda

NIP. 19740521 199303 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

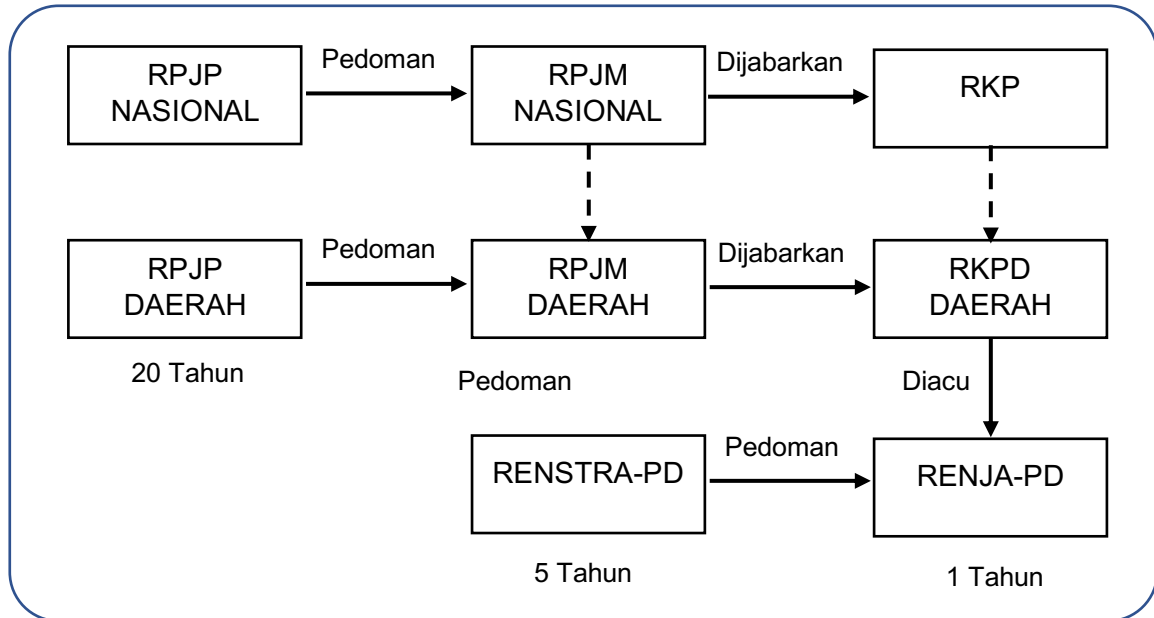
1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Dinas ESDM periode 2021 – 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja. Evaluasi hasil Renja tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan dijadikan acuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra. Penyusunan rancangan awal Renja mencakup analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja tahun lalu.

Penyempurnaan rancangan awal Renja mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD. Rancangan Renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang bertujuan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Rancangan akhir Renja diverifikasi oleh BAPPEDA yang kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja kemudian menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Keterkaitan antara Renja dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada began alur perencanaan pembangunan daerah yang disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Alur Perencanaan Pembangunan Daerah

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan Renja Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 adalah peraturan tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah, di antaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) yang sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
13. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026;
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas;
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah;
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

- Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas ESDM pada tahun 2022
- Menetapkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan bersama dengan pagu indikatif tahun anggaran 2022 untuk pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dari Dokumen Renja Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut.

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2021 mengacu pada APBD Tahun 2021, yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja pada tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi dan realisasi Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2020 yaitu:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan
Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan, dimana target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

| Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Unit | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|---------------------|
| Program Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan | | | | | |
| Kegiatan: | | | | | |
| - Inventarisasi Potensi Pengusahaan Mineral dan Batubara | Jumlah dokumen data spasial Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) | dokumen | 7 | 5 | 71,4% |
| - Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara | Jumlah peserta sosialisasi/ rekonsiliasi IUP | orang | 40 | 0 | 0,0% |
| - Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara | Jumlah IUP yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan finansial | perusahaan | 91 | 41 | 45,1% |
| - Inventarisasi Lahan Terganggu dan Pertambangan Rakyat | Jumlah luasan lahan terganggu akibat pertambangan yang terinventarisasi | Ha | 150 | 117,64 | 78,4% |
| | | | | | |
| Program Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah | | | | | |
| Kegiatan: | | | | | |
| - Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah | Jumlah laporan pembinaan, pengawasan dan pengendalian air tanah | laporan | 2 | 1 | 50% |
| - Inventarisasi Data Geologi dan Air Tanah | Jumlah peserta sosialisasi mitigasi bencana | orang | 80 | 0 | 0% |
| - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengusahaan Air Tanah | Jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan air tanah | orang | 60 | 0 | 0% |
| | | | | | |
| Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan | | | | | |
| Kegiatan: | | | | | |
| - Inventarisasi dan Pengelolaan Data Ketenagalistrikan | Jumlah Dokumen pengembangan ketenagalistrikan daerah | dokumen | 5 | 3 | 60% |
| - Pengusahaan Ketenagalistrikan | Jumlah sambungan rumah untuk Rumah Tangga Sasaran | SR | 178 | 118 | 66,3% |
| - Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan | Jumlah data teknik dan keselamatan usaha ketenagalistrikan | perusahaan | 50 | 30 | 60% |
| | | | | | |
| Program Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) | | | | | |
| Kegiatan: | | | | | |
| - Pengembangan Kegiatan Energi | Jumlah dokumen potensi EBT, dokumen FS dan dokumen RUED | dokumen | 10 | 4 | 40% |
| - Pengusahaan Kegiatan Energi Baru Terbarukan | Jumlah pembangunan/ pemasangan EBT | unit | 49 | 0 | 0% |
| - Pembinaan dan Pengendalian Pengusahaan Bidang energi | Jumlah peserta workshop pengusahaan pengendalian EBT | orang | 50 | 0 | 0% |
| - Pembinaan dan Pengendalian Konservasi Energi | Jumlah peserta sosialisasi konservasi energi | orang | 120 | 60 | 50% |

2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Untuk kegiatan yang tepat memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

| Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Unit | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|--------|-----------|---------------------|
| Program Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah | | | | | |
| Kegiatan: | | | | | |
| - Pemetaan zona konservasi air tanah | Jumlah lokasi cekungan air tanah yang dipetakan | Lokasi | 1 | 1 | 100% |
| Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan | | | | | |
| Kegiatan: | | | | | |
| - Survey Pengembangan Ketenagalistrikan | Jumlah dokumen dan/atau DED listrik pedesaan | dokumen | 2 | 2 | 100% |

3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

| Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Unit | Target | Realisasi | Tingkat Capaian (%) |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------|-----------|---------------------|
| Program Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan | Jumlah Usaha Pertambangan Yang Baik | IUP | 91 | 126 | 138,5% |
| Kegiatan: | | | | | |
| - Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Konservasi Pertambangan | Jumlah perusahaan tambang yang diawasi | IUP | 38 | 44 | 115,8% |
| Program Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah | Persentase pemanfaatan cekungan air tanah | % | 35 | 38 | 108,6% |
| Kegiatan: | | | | | |
| - Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pengusahaan Air Tanah | Jumlah sumur bor yang dibangun | titik | 4 | 7 | 175,0% |
| Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan | Persentase rasio elektrifikasi rumah tangga | % | 96 | 96,03 | 100,0% |
| Program Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) | Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) | % | 7 | 9,97 | 142,4% |

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja kegiatan:

- Terjadinya pandemic covid-19 sehingga anggaran banyak yang dialihkan pengalokasiannya untuk penanganan Covid-19 (refocusing) yang mengakibatkan banyak kegiatan tidak dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

- Covid-19 juga menyebabkan perubahan harga satuan barang dan keterbatasan dalam ruang gerak sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya
- Kegiatan-kegiatan sosialisasi tidak dapat dilaksanakan untuk mencegah penyebaran Covid-19

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja kegiatan:

- Kegiatan telah direncanakan dengan baik
- Proses pengadaan telah sesuai dengan timeline yang telah ditentukan

Faktor-faktor penyebab terlampaunya target kinerja program/ kegiatan:

- Adanya penambahan anggaran pada saat penyusunan APBD Perubahan
- Adanya koordinasi yang baik antara Dinas ESDM dengan instansi-instansi terkait yang mendukung pencapaian target kinerja.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
 - Meningkatnya pemanfaatan cekungan air tanah
 - Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan
 - Meningkatnya rasio elektrifikasi Sulawesi Tengah
 - Meningkatnya jumlah IUP yang telah memenuhi kaidah pertambangan yang baik.
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, yaitu:
 - Perencanaan anggaran dan target kinerja perlu ditingkatkan lagi
 - Kegiatan-kegiatan prioritas seperti kegiatan yang menyentuh masyarakat langsung harus didahulukan
 - Koordinasi antara Dinas ESDM dan instansi-instansi terkait perlu ditingkatkan lagi.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Provinsi Sulawesi Tengah

Nama Perangkat Daerah: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Kinerja Pencapaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 | Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2021) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021 | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | | | | Target Renja PD tahun 2020 | Realisasi Renja PD Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 3 05 01 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 60% | 80 % | 80 % | 100 | N/A | N/A | N/A |
| | Kegiatan: | | | | | | | | | |
| 3 05 01 01 18 | 1. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah | Jumlah laporan hasil rapat-rapat koordinasi & konsultasi | | | 4 laporan | 2 laporan | 50 | N/A | N/A | N/A |
| 3 05 01 01 19 | 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 4 pkt | 4 pkt | 100 | N/A | N/A | N/A |
| 3 05 01 01 20 | 3. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur dan Pengembangan Organisasi ESDM | Jumlah laporan hasil koordinasi tentang sumberdaya aparatur dinas | | | 8 laporan | 4 laporan | 50 | N/A | N/A | N/A |
| 3 05 01 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur | 100% | 60% | 80 % | 80 % | 100 | N/A | N/A | N/A |
| | Kegiatan: | | | | | | | | | |
| 3 05 01 02 12 | 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor | | | 95 % | 95 % | 100 | N/A | N/A | N/A |
| 3 05 01 02 30 | 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase pemeliharaan sarana prasarana kantor | | | 95 % | 95 % | 100 | N/A | N/A | N/A |
| 3 05 01 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 100% | 60% | 80 % | 80 % | 100 | N/A | N/A | N/A |
| | Kegiatan: | | | | | | | | | |
| 3 05 01 05 07 | 1. Pendidikan dan pelatihan Non formal | Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Non Formal | | | 4 org | 4 org | 100 | N/A | N/A | N/A |
| 3 05 01 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 | N/A | N/A | N/A |
| | Kegiatan: | | | | | | | | | |
| 3 05 01 06 01 | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan capaian kinerja SKPD | | | 2 laporan | 2 laporan | 100 | N/A | N/A | N/A |
| 3 05 01 06 02 | 2. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah/Asset | Jumlah Laporan pengelolaan barang milik negara/daerah/asset | | | 6 laporan | 4 laporan | 66,67 | N/A | N/A | N/A |
| 3 05 01 07 | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan | Tercapainya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas | 100% | 100% | 100 % | 100 % | 100 | N/A | N/A | N/A |
| | Kegiatan: | | | | | | | | | |
| 3 05 01 07 14 | 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan | Laporan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan ESDM | | | 3 laporan | 3 laporan | 100 | N/A | N/A | N/A |
| 3 05 01 07 26 | 2. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan | Laporan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan | | | 5 laporan | 3 laporan | 60 | N/A | N/A | N/A |
| 3 05 01 07 29 | 3. Pengelolaan Data & Informasi ESDM | Jumlah laporan data statistik sektor ESDM | | | 4 laporan | 3 laporan | 75 | N/A | N/A | N/A |
| 3 05 01 23 | Program Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan | Jumlah usaha pertambangan yang baik | 275 IUP | 86 IUP | 91 IUP | 91 IUP | 100 | N/A | N/A | N/A |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Kinerja Pencapaian Program (Renstra PD) Tahun 2021 | Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun 2021) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2021 | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | | | | Target Renja PD tahun 2020 | Realisasi Renja PD Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| | | | | | | | | | | |
| | Kegiatan: | | | | | | | | | |
| 3 05 01 23 01 | 1. Inventarisasi Potensi Pengusahaan Mineral dan Batubara | Jumlah Dokumen Data Spasial Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) | | | 7 dokumen | 5 dokumen | 71,43 | N/A | N/A | N/A |
| 3 05 01 23 02 | 2. Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara | Jumlah peserta sosialisasi/rekonsiliasi IUP | | | 40 org | 0 org | 0 | N/A | N/A | N/A |
| 3 05 01 23 03 | 3. Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara | Jumlah IUP yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan finansial | | | 91 perusahaan | 91 perusahaan | 100 | N/A | N/A | N/A |
| 3 05 01 23 04 | 4. Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan Konservasi Pertambangan | Jumlah perusahaan tambangan yang diawasi | | | 38 IUP | 38 IUP | 100 | N/A | N/A | N/A |
| 3 05 01 23 05 | 5. Inventarisasi Lahan Terganggu dan Pertambangan Rakyat | Jumlah luasan lahan terganggu akibat pertambangan tanpa izin yang terinventarisasi | | | 150 Ha | 50 Ha | 33,33 | N/A | N/A | N/A |
| 3 05 01 24 | Program Pembinaan dan pengembangan Ketenagalistrikan | Persentase Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga | 86% | 94,70% | 96 % | 96,03 % | 100,03 | N/A | N/A | N/A |
| | Kegiatan: | | | | | | | | | |
| 3 05 01 24 01 | 1. Inventarisasi dan Pengelolaan Data Ketenagalistrikan | Jumlah Dokumen pengembangan ketenagalistrikan daerah | | | 5 dokumen | 3 dokumen | 60 | N/A | N/A | N/A |
| 3 05 01 24 02 | 2. Survey Pengembangan Ketenagalistrikan | Jumlah Dokumen survey dan/atau DED lides | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 | N/A | N/A | N/A |
| 3 05 01 24 03 | 3. Pengusahaan Ketenagalistrikan | Jumlah Sambungan Rumah (SR) untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) | | | 178 SR | 118 SR | 66,29 | N/A | N/A | N/A |
| 3 05 01 24 04 | 4. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan | Jumlah Data teknik dan keselamatan usaha ketenagalistrikan | | | 50 perusahaan | 30 perusahaan | 60 | N/A | N/A | N/A |
| 3 05 01 25 | Program Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) | Persentase pemanfaatan EBT | 9% | 5,10% | 7 % | 9,97 % | 142,4 | N/A | N/A | N/A |
| | Kegiatan: | | | | | | | | | |
| 3 05 01 25 01 | 1. Pengembangan Kegiatan Energi | Jumlah Dokumen potensi EBT, Dokumen FS dan Dokumen RUED | | | 10 dokumen | 4 dokumen | 40 | N/A | N/A | N/A |
| 3 05 01 25 02 | 2. Pengusahaan Kegiatan Energi Baru Terbarukan | Jumlah pembangunan/ pemasangan EBT | | | 49 unit | 0 unit | 0 | N/A | N/A | N/A |
| 3 05 01 25 03 | 3. Pembinaan dan Pengendalian Pengusahaan Bidang Energi | Jumlah peserta workshop pengusahaan pengendalian EBT | | | 50 org | 0 org | 0 | N/A | N/A | N/A |
| 3 05 01 25 04 | 4. Pembinaan dan Pengendalian Program Konservasi Energi | Jumlah peserta sosialisasi konservasi energi | | | 120 org | 60 org | 50 | N/A | N/A | N/A |
| 3 05 01 26 | Program Pengembangan Bidang Geologi dan Air Tanah | Persentase pemanfaatan cekungan air tanah | N/A | 38% | 35 % | 38 % | 108,6 | N/A | N/A | N/A |
| | Kegiatan: | | | | | | | | | |
| 3 05 01 26 01 | 1. Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah | Jumlah laporan pembinaan, pengawasan dan pengendalian air tanah | | | 2 laporan | 2 laporan | 100 | N/A | N/A | N/A |
| 3 05 01 26 02 | 2. Inventarisasi Data Geologi dan Air Tanah | Jumlah peserta sosialisasi mitigasi bencana | | | 80 org | 0 org | 0 | N/A | N/A | N/A |
| 3 05 01 26 03 | 3. Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pengusahaan Air Tanah | Jumlah sumur bor yang dibangun | | | 4 titik | 7 titik | 175 | N/A | N/A | N/A |
| 3 05 01 26 04 | 4. Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah | Jumlah lokasi cekungan air tanah yang dipetakan | | | 1 lokasi | 0 lokasi | 0 | N/A | N/A | N/A |
| 3 05 01 26 05 | 5. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengusahaan Air Tanah | Jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan air tanah | | | 60 org | 0 org | 0 | N/A | N/A | N/A |

Karena terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, maka nomenklatur urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan mengalami perubahan sehingga program dan kegiatan sebelum terbitnya Permendagri tersebut menjadi tidak relevan lagi. Oleh karena itu, target program dan kegiatan Renja tahun 2021 untuk program dan kegiatan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya tidak dapat diisi pada tabel di atas.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tingkat capaian kinerja yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulawesi Tengah

| No | Indikator | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------|------|-------------------|------|----------|------|-------------------------------------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1. | Jumlah Usaha Pertambangan Yang Baik dan Benar serta ramah lingkungan | 250 IUP | 275 IUP | N/A | N/A | 126 IUP | | N/A | N/A | Indikator baru ditentukan untuk Renstra periode 2021 - 2026 |
| 2. | Persentase rasio elektrifikasi sektor masyarakat, pemerintah dan industri | 84% | 86% | N/A | N/A | 96,03% | | N/A | N/A | Indikator baru ditentukan untuk Renstra periode 2021 - 2026 |
| 3. | Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) | 8% | 9% | N/A | N/A | 9,96% | | N/A | N/A | Indikator baru ditentukan untuk Renstra periode 2021 - 2026 |
| 4. | Pemanfaatan sumber daya geologi dan air tanah | 9 unit sumur bor | 10 unit sumur bor | N/A | N/A | 7 unit sumur bor | | N/A | N/A | Indikator baru ditentukan untuk Renstra periode 2021 - 2026 |

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan program dan kegiatan.

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain:

1. Rasio Elektrifikasi Provinsi Sulawesi Tengah masih di bawah target nasional. Rasio elektrifikasi pada tahun 2020 adalah 96,03% sedangkan target rasio elektrifikasi nasional pada tahun 2020 adalah 99,9%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi:

- Rendahnya fasilitasi penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan khususnya bagi masyarakat tidak mampu
 - Masih rendahnya pembinaan dan pengawasan di sector ketenagalistrikan
 - Kurang komprehensifnya perencanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan
2. Masih minimnya pemanfaatan energi baru terbarukan yaitu sekitar 9,96% dari pemanfaatan energi yang ada (data tahun 2020). Target produksi energi baru terbarukan dalam bauran energi pada tahun 2020 adalah 10,33%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi:

- Masih kurangnya dokumen perencanaan pengembangan energi baru terbarukan
 - Masih rendahnya penyediaan infrastruktur energi baru terbarukan khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil dan terisolir
 - Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang konservasi energi
 - Kurang efektifnya koordinasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan
3. Belum optimalnya pemanfaatan air tanah

Faktor-faktor yang mempengaruhi:

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap perizinan air tanah
 - Belum semua kabupaten/ kota telah menetapkan nilai perolehan air tanah
 - Belum lengkapnya pemetaan zona konservasi air tanah di daerah Sulawesi Tengah
 - Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan air tanah
4. Masih adanya usaha pertambangan yang belum memenuhi kewajiban secara administratif, teknis dan finansial. Di tahun 2020, dari 445 IUP Mineral logam, mineral non logam dan batuan yang ada, terdapat 134 IUP yang memenuhi kewajiban administratif dan finansial namun belum sepenuhnya memenuhi kewajiban teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor-faktor yang mempengaruhi:

- Belum optimalnya mekanisme proses penerbitan rekomendasi teknis perizinan usaha pertambangan
- Belum optimalnya pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan
- Masih adanya kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di daerah Sulawesi Tengah yang memberikan dampak negative bagi lingkungan maupun kehidupan sosial.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. RKPD merupakan pedoman bagi OPD dalam Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). RKPD tersusun melalui beberapa mekanisme perencanaan yaitu melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD).

Seiring dengan perkembangan kebutuhan, terjadi proses penyesuaian yang dilakukan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjawab dinamika yang terjadi. Penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan tentunya tetap harus mengacu pada visi, misi dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam RKPD awal yang dirancang, terdapat beberapa sub kegiatan dengan anggaran yang tidak mencukupi untuk mencapai target yang diharapkan untuk mendukung pencapaian target tujuan, sasaran maupun program. Dari beberapa sub kegiatan itu juga terdapat sub kegiatan yang mendukung program penanggulangan kemiskinan. Beberapa sub kegiatan yang dimaksud adalah:

1. Sub Kegiatan Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan air Tanah. Keluaran pada sub kegiatan ini adalah berupa dokumen pemetaan zona konservasi air tanah. Dengan anggaran awal sebesar Rp.51.951.000 maka target indicator tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, anggaran untuk sub kegiatan tersebut perlu direvisi.
2. Sub kegiatan Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah sumur bor yang dibangun. Pada RKPD awal, anggaran hanya cukup untuk pembangunan 2 (dua) sumur bor. Hal ini tidak seimbang dengan jumlah proposal permintaan pembangunan sumur bor dari daerah-daerah yang sulit air. Oleh karena itu, dianggap perlu untuk menambahkan target capaian dan anggaran untuk dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat.
3. Sub Kegiatan Pengalokasian Anggaran Untuk Program Konservasi Energi. Sub kegiatan ini termasuk salah satu sub kegiatan yang mendukung program penanggulangan kemiskinan. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah kapasitas terpasang dari infrastruktur EBT yang dibangun. Pada RKPD awal, sub kegiatan ini tidak mendapatkan alokasi anggaran karena adanya keterbatasan pagu anggaran. Namun, sub kegiatan ini dianggap perlu untuk dilaksanakan agar masyarakat di daerah terpencil dapat memperoleh bantuan berupa Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) ataupun Solar Home System (SHS). LTSHE ataupun SHS dapat dipasang di tiap rumah agar masyarakat di daerah terpencil bisa memperoleh akses terhadap listrik tanpa bergantung pada listrik PLN.
4. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan. Sub kegiatan ini termasuk salah satu sub kegiatan yang mendukung program penanggulangan kemiskinan. Keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah rumah tangga yang menerima bantuan penyediaan tenaga listrik.

Pada RKPD awal, anggaran yang dialokasikan hanya mampu untuk menyambungkan kWh meter dan instalasi listriknya kepada 140 rumah tangga. Hal ini tidak seimbang dengan jumlah rumah tangga belum berlistrik di Sulawesi Tengah yang mencapai lebih dari 30.000 rumah tangga. Oleh karena itu, perlu adanya revisi anggaran dan target capaian untuk sub kegiatan ini berdasarkan Analisa kebutuhan.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sulawesi Tengah

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil analisis kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| 1. | Program Pengelolaan Aspek Kegeologian | | | | | Program Pengelolaan Aspek Kegeologian | | | | | |
| | Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | |
| | Sub Keg: | | | | | Sub Keg: | | | | | |
| | - Penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah | Kab. Poso | Jumlah dokumen pemetaan zona konservasi air tanah | 1 dok | 51.951.000 | - Penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah | Kab. Poso | Jumlah dokumen pemetaan zona konservasi air tanah | 1 dok | 250.000.000 | |
| | Kegiatan Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | Kegiatan Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | | | | | |
| Sub Keg: | | | | | Sub Keg: | | | | | | |
| - Penetapan prosedur dan persyaratan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah | Kab. Donggala, Kab. Parimo | Jumlah sumur bor yang dibangun | 2 titik | 413.401.000 | - Penetapan prosedur dan persyaratan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah | Kab. Donggala, Kab. Parimo, Kab. Banggai | Jumlah sumur bor yang dibangun | 4 titik | 920.000.000 | | |
| 2. | Program Pengelolaan Energi Terbarukan | | | | | Program Pengelolaan Energi Terbarukan | | | | | |
| | Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi | | | | | Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi | | | | | |
| | Sub Keg: | | | | | Sub Keg: | | | | | |
| - Pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi | - | Jumlah kapasitas terpasang dari infrastruktur EBT yang dibangun | - | - | - Pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi | Kab. Donggala, Kab. Sigi, Kab. Banggai | Jumlah kapasitas terpasang dari infrastruktur EBT yang dibangun | 1800 Watt | 330.360.775 | | |

| No | Rancangan Awal RKP | | | | | Hasil analisis kebutuhan | | | | | Catatan penting |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| | Sub Keg: | | | | | Sub Keg: | | | | | |
| | - Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik beum berkembang, daerah terpencil dan perdesaam | Kab. Donggala, Kab. Sigi | Jumlah rumah tangga yang menerima bantuan penyediaan tenaga listrik | 140 SR | 371.390.700 | - Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan | Kab. Donggala, Kab. Sigi, Kab. Parimo, Kab. Poso | Jumlah rumah tangga yang menerima bantuan penyediaan tenaga listrik | 11091 RTS | 31.054.800.000 | |

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah juga mempertimbangkan usulan program dan kegiatan masyarakat. Usulan program dan kegiatan tersebut dapat melalui Musrenbang, forum OPD ataupun dalam bentuk proposal yang langsung diserahkan ke Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah.

Usulan-usulan yang masuk merupakan usulan-usulan terkait permintaan bantuan pembangunan sumur air tanah, permintaan bantuan penyambungan kwh meter gratis, permintaan bantuan pemasangan SHS/ LTSHE dan permintaan bantuan pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS). Usulan-usulan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku kepentingan Tahun 2022
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Sulawesi Tengah

| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1. | Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | | | | |
| | - Meteran gratis warga miskin Desa Tinombo | Kab. Parigi Moutong | Jumlah rumah tangga yang menerima bantuan | 50 KK | Usulan dari forum OPD Tahun 2021 |
| | - Pengadaan Listrik Tenaga Surya untuk Masyarakat Terpencil Dusun IV Supilopong Kec. Tomini | Kab. Parigi Moutong | Jumlah rumah tangga yang menerima bantuan | 66 unit | Usulan dari forum OPD Tahun 2021 |
| | - Pengadaan Lampu Penerangan untuk Rumah Miskin Desa Sidoan Barat Kec. Sidoan | Kab. Parigi Moutong | Jumlah rumah tangga yang menerima bantuan | 250 KK | Usulan dari forum OPD Tahun 2021 |
| | - Pengadaan Tenaga Surya Desa Taniuge Kec. Tomini | Kab. Parigi Moutong | Jumlah rumah tangga yang menerima bantuan | 50 paket | Usulan dari forum OPD Tahun 2021 |
| | - Pengadaan kWh listrik Kecamatan Siniu | Kab. Parigi Moutong | Jumlah rumah tangga yang menerima bantuan | 20 KK | Usulan dari forum OPD Tahun 2021 |
| | - Pengadaan meteran listrik Kecamatan Siniu | Kab. Parigi Moutong | Jumlah rumah tangga yang menerima bantuan | 50 KK | Usulan dari forum OPD Tahun 2021 |
| | - Pengadaan PJUTS Desa Supilopong Kec. Tomini | Kab. Parigi Moutong | Jumlah rumah tangga yang menerima bantuan | 10 unit | Usulan dari forum OPD Tahun 2021 |
| | - Pengadaan Lampu Tenaga Surya berskala Rumah Tangga Desa Supilopong Kec. Tomini | Kab. Parigi Moutong | Jumlah rumah tangga yang menerima bantuan | 50 unit | Usulan dari forum OPD Tahun 2021 |
| | | | | | |
| 2. | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | |
| | - Pengadaan Lampu jalan Desa Masari Kec. Parigi Selatan | Kab. Parigi Moutong | Jumlah Unit PJU | 3 unit | Usulan dari forum OPD Tahun 2021 |
| | - Pengadaan Lampu Jalan Desa Ogobagis Kec. Sidoan | Kab. Parigi Moutong | Jumlah Unit PJU | 10 unit | Usulan dari forum OPD Tahun 2021 |
| | - Pengadaan Lampu Jalan Desa Sibolaga | Kab. Parigi Moutong | Jumlah Unit PJU | 10 unit | Usulan dari forum OPD Tahun 2021 |

| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 3. | Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi energi | | | | |
| | - Pengadaan SHS Trans 2 Buleleng | Kab. Morowali | Jumlah rumah tangga yang menerima bantuan | 110 unit | Usulan dari forum OPD Tahun 2021 |
| | - Pengadaan SHS Desa Panimbawang | Kab. Morowali | Jumlah rumah tangga yang menerima bantuan | 90 unit | Usulan dari forum OPD Tahun 2021 |
| | - Pengadaan SHS Desa Polewali | Kab. Morowali | Jumlah rumah tangga yang menerima bantuan | 85 unit | Usulan dari forum OPD Tahun 2021 |
| | - Pengadaan SHS Desa Tanjung Harapan | Kab. Morowali | Jumlah rumah tangga yang menerima bantuan | 90 unit | Usulan dari forum OPD Tahun 2021 |
| | - Pengadaan SHS Desa Bungintende | Kab. Morowali | Jumlah rumah tangga yang menerima bantuan | 80 unit | Usulan dari forum OPD Tahun 2021 |
| | - Pengadaan SHS Desa Dongkalan | Kab. Morowali | Jumlah rumah tangga yang menerima bantuan | 70 unit | Usulan dari forum OPD Tahun 2021 |
| | - Pengadaan SHS Dusun Folili | Kab. Morowali | Jumlah rumah tangga yang menerima bantuan | 40 unit | Usulan dari forum OPD Tahun 2021 |
| | | | | | |
| 4. | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | | | | |
| | - Penyediaan sambungan Jaringan Listrik (penyambungan kwh meter) bagi masyarakat Dusun I dan II Desa Talima B Kec. Balantak | Kab. Banggai | Jumlah rumah tangga yang menerima bantuan | 10 KK | Usulan dari forum OPD Tahun 2021 |
| | - Penyediaan sambungan Jaringan Listrik (penyambungan kwh meter) bagi masyarakat Dusun I, II, III dan IV Desa Pangkalaseang Kec. Balantak Utara | Kab. Banggai | Jumlah rumah tangga yang menerima bantuan | 60 KK | Usulan dari forum OPD Tahun 2021 |
| | - Penyediaan sambungan Jaringan Listrik (penyambungan kwh meter) bagi masyarakat Dusun I dan II Desa Lembah Makmur Kec. Bualemo | Kab. Banggai | Jumlah rumah tangga yang menerima bantuan | 68 KK | Usulan dari forum OPD Tahun 2021 |
| | - Penyediaan sambungan Jaringan Listrik (penyambungan kwh meter) bagi masyarakat lingkungan 1, 2 dan 3 Kel. Kintom Kec. Kintom | Kab. Banggai | Jumlah rumah tangga yang menerima bantuan | 18 KK | Usulan dari forum OPD Tahun 2021 |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur serta mendukung visi misi Presiden, KESDM terus melakukan pembenahan dan penyempurnaan di seluruh aspek sector energi dan sumber daya mineral. Dengan mempertimbangkan capaian kinerja sector ESDM yang masih dapat dioptimalkan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi, serta memperhatikan peluang dan aspirasi dari seluruh pihak, maka visi KESDM periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional Melalui Pengelolaan ESDM yang Optimal Demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat Yang Adil dan Merata”

Demi mewujudkan visi KESDM, maka dilakukan upaya sistematis melalui misi KESDM, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai KESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti)
2. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan
3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan dan konservasi energi
4. Menjamin ketersediaan energi nasional
5. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi).

Arah kebijakan pembangunan ESDM berpedoman pada paradigma bahwa sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, tetapi sebagai modal pembangunan nasional untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi. Kemandirian dan ketahanan energi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian energi merupakan terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri
2. Ketahanan energi nasional adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi (*availability*), akses masyarakat terhadap energi (*accessibility*) pada harga yang terjangkau (*affordability*) dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup (*acceptability*).

Untuk periode 2020 – 2024 kebijakan sector ESDM difokuskan pada pembangunan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong pengembangan industry. Adapun arah kebijakan diprioritaskan pada ketersediaan energi dengan memaksimalkan pemanfaatan EBT, keadilan social di bidang energi yang menekankan kepada ketersediaan energi terbarukan dengan harga terjangkau dan kegiatan ekstraktif yang ramah lingkungan.

Tabel 3.1 Sasaran Strategis Kementerian ESDM beserta indikator kinerja utama

| No | Sasaran Strategis KESDM | Indikator Kinerja Utama |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional | Indeks Kemandirian Energi Nasional |
| | | Indeks Ketahanan Energi Nasional |
| 2 | Optimalisasi ketersediaan produk mineral | Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri |
| 3 | Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi | Indeks Mitigasi Bencana Geologi |
| 4 | Meningkatnya kompetensi SDM | Jumlah Pengembangan SDM yang kompeten dan profesional |
| 5 | Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan | Persentase realisasi PNBPN |
| | | Persentase realisasi investasi |
| 6 | Layanan sektor ESDM yang optimal | Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM |
| 7 | Perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM yang berkualitas | Indeks Kualitas Kebijakan |
| | | Indeks Implementasi Kebijakan |

| No | Sasaran Strategis KESDM | Indikator Kinerja Utama |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 8 | Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sektor ESDM yang efektif | Indeks Efektivitas pembinaan dan pengawasan |
| | | Indeks maturitas SPIP |
| | | Nilai SAKIP ESDM |
| 9 | Penelitian dan pengembangan ESDM produktif | Jumlah pemanfaatan hasil litbang |
| 10 | Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima | Indeks reformasi birokrasi |
| 11 | Organisasi yang fit dan SDM unggul | Nilai evaluasi kelembagaan |
| | | Indeks profesionalitas ASN |
| 12 | Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi | Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) |
| 13 | Pengelolaan sistem anggaran yang optimal | Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) |
| | | Opini BPK RI atas Laporan Keuangan KESDM |

Jika ditinjau dari sasaran strategis jangka menengah Kementerian ESDM, maka dari beberapa sasaran strategis tersebut memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sasaran strategis Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah. Sasaran strategis KESDM “Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional” berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Energi Baru Terbarukan dan Bidang Ketenagalistrikan di Dinas ESDM, sasaran strategis “Optimalisasi ketersediaan produk mineral” berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Minerba serta sasaran strategis “Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi” masih berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Geologi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari

pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Dari tiap tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan perumusan indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan dari tujuan/ sasaran. Berikut merupakan tujuan, sasaran dan indikator tujuan/ sasaran dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selama periode 5 (lima) tahun.

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

| No | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Meningkatkan pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan | | Persentasi kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dalam PDRB | 14% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| | | Meningkatnya nilai tambah sektor sumber daya mineral | Nilai kontribusi sektor pertambangan mineral terhadap DBH Provinsi Sulawesi Tengah (milyar rupiah) | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
| 2. | Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan infrastruktur energi daerah | | Rasio ketersediaan energi Sulawesi Tengah (%) | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 |
| | | Meningkatnya kualitas infrastruktur energi | Persentase desa teraliri listrik (%) | 99,90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Porsi EBT dalam bauran energi Sulawesi Tengah (%) | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 |

3.3. Program dan Kegiatan

Beberapa factor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian visi misi Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2. Tugas dan fungsi Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 79 Tahun 2016
3. Pencapaian pelaksanaan program pengentasan kemiskinan

Adapun jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2022 adalah sebanyak 5 program, 24 kegiatan dan 68 sub kegiatan di dinas induk. Untuk UPT Laboratorium terdapat 2 program, 6 kegiatan dan 15 sub kegiatan. Pada Cabang Dinas ESDM Wilayah I (Kabupaten Buol dan Tolitoli) terdapat 4 program, 11 kegiatan dan 21 sub kegiatan. Pada Cabang Dinas ESDM Wilayah II (Kabupaten Poso dan Tojo Una-una) terdapat 4 program, 12 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Pada Cabang Dinas ESDM Wilayah III (Kabupaten Morowali dan Morowali Utara) terdapat 4 program, 12 kegiatan dan 21 sub kegiatan. Pada Cabang Dinas ESDM Wilayah IV (Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut) terdapat 4 program, 10 kegiatan dan 21 sub kegiatan. Pada Cabang Dinas ESDM Wilayah V (Kabupaten Sgi, Donggala, Parigi Moutong dan Kota Palu) terdapat 4 program, 8 kegiatan dan 17 sub kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 mengajukan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 24.855.282.453. Adapun rincian dari program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas ESM Provinsi Sulawesi Tengah ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Periode 2022

- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| | | | | Target | Rp | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 29 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | | | | 24.043.327.875 | | |
| 3 29 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Reformasi Birokrasi | | 64,5 | 13.829.033.575 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 29 01 1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Sakip | | 81 | 234.223.150 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 29 01 1.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | | 1 dok | 19.040.000 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Palu |
| 3 29 01 1.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA | | 1 dok | 11.505.650 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Palu |
| 3 29 01 1.01 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA Perubahan | | 1 dok | 9.137.500 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Palu |
| 3 29 01 1.01 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA | | 7 dok | 4.050.000 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Palu |
| 3 29 01 1.01 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA Perubahan | | 7 dok | 7.000.000 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Palu |
| 3 29 01 1.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja | | 3 dok | 97.890.000 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Palu |
| 3 29 01 1.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja | | 1 dok | 85.600.000 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulawesi Tengah |
| 3 29 01 1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan | | 2 laporan | 10.972.002.421 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 29 01 1.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan | | 14 laporan | 10.928.802.446 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Palu |
| 3 29 01 1.02 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah dokumen keuangan SKPD | | 1 dok | 30.099.925 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Palu |
| 3 29 01 1.02 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester SKPD | Jumlah laporan keuangan | | 12 laporan | 13.100.050 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Palu |
| 3 29 01 1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah | | 2 laporan | 58.554.775 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 29 01 1.03 04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah | | 4 laporan | 45.379.775 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 29 01 1.03 05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah | | 1 laporan | 13.175.000 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 29 01 1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | | 80 | 103.865.000 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 29 01 1.05 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah laporan data pegawai | | 1 laporan | 24.330.000 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 29 01 1.05 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah laporan SKP yang tepat waktu | | 65 laporan | 48.410.000 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 29 01 1.05 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | 5 laporan | 16.725.000 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng/ Daerah lainnya |
| 3 29 01 1.05 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan | Jumlah laporan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan | | 1 laporan | 14.400.000 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Palu |

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| | | | | Tahun 2022 | | | |
| | | | | Target | Rp | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 29 01 1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa | | 8 laporan | 458.422.204 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng/ Daerah lainnya |
| 3 29 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket pengadaan | | 1 paket | 5.011.139 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Palu |
| 3 29 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket pengadaan | | 2 paket | 121.194.000 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Palu |
| 3 29 01 1.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket pengadaan | | 2 paket | 58.262.100 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Palu |
| 3 29 01 1.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket pengadaan | | 1 paket | 8.012.240 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Palu |
| 3 29 01 1.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket pengadaan | | 1 paket | 41.577.725 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Palu |
| 3 29 01 1.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah paket pengadaan | | 1 paket | 16.800.000 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Palu |
| 3 29 01 1.06 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah paket pengadaan | | 1 paket | 10.500.000 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Palu |
| 3 29 01 1.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi | | 11 laporan | 197.065.000 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng/ Daerah Lainnya |
| 3 29 01 1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | 2 laporan | 126.199.800 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Palu |
| 3 29 01 1.07 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah mebel | | 1 paket | 27.838.000 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Palu |
| 3 29 01 1.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya | | 2 paket | 98.361.800 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Palu |
| 3 29 01 1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | 3 laporan | 1.461.266.225 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Palu |
| 3 29 01 1.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah pengiriman dokumen | | 100 paket | 3.250.000 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Palu |
| 3 29 01 1.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | 12 bulan | 257.560.225 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Palu |
| 3 29 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah paket pelayanan umum kantor | | 3 paket | 1.200.456.000 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Palu |
| 3 29 01 1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | | 3 laporan | 414.500.000 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Palu |
| 3 29 01 1.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah jasa | | 3 paket | 295.000.000 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Palu |
| 3 29 01 1.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | | 3 paket | 27.500.000 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Palu |
| 3 29 01 1.09 09 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung yang dipelihara | | 1 paket | 92.000.000 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Palu |
| 3 29 02 | Program Pengelolaan Aspek Kegeologian | Persentase Pemanfaatan Air Tanah Berbasis Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi | | 8,82% | 3.074.960.000 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 29 02 1.01 | Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Jumlah Kabupaten yang telah dilakukan pemetaan zona konservasi air tanah | | 7 kab | 291.889.075 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 29 02 1.01 01 | Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | Jumlah laporan terkait data zona konservasi air tanah pada CAT dalam daerah provinsi | | 3 laporan | 28.622.500 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 29 02 1.01 02 | Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | Jumlah dokumen pemetaan zona konservasi air tanah | | 1 dok | 227.049.075 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 29 02 1.01 03 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan zona konservasi air tanah pada CAT | | 4 laporan | 36.217.500 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------|
| | | | | Tahun 2022 | | | |
| | | | | Target | Rp | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 29 02 1.02 | Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Jumlah perusahaan pengguna air tanah komersial yang telah memiliki izin | | 53 perusahaan | 2.733.361.250 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 29 01 1.02 01 | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah | Jumlah dokumen SOP Layanan Perizinan Air Tanah | | 0 | 2.708.361.300 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 29 01 1.02 02 | | Jumlah sumur bor yang dibangun | | 2 titik | | | |
| 3 29 01 1.02 02 | Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah | Jumlah Rekomendasi layanan Perizinan Air Tanah | | 5 rekomendasi | 24.999.950 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 29 01 1.03 | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Jumlah kabupaten/ kota yang telah ditetapkan NPA-nya | | 3 kab/kota | 49.709.675 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 29 01 1.03 01 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah | Jumlah Laporan kumpulan data pendukung nilai NPA | | 3 laporan | 28.201.475 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 29 01 1.03 02 | Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah | Jumlah laporan perumusan nilai NPA | | 3 laporan | 21.508.200 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 29 03 | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | Persentase IUP yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik | | 30% | 429.184.650 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 29 03 1.01 | Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah WIUP Mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan dalam daerah provinsi | | 30 WIUP | 63.547.300 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 29 03 1.01 02 | Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah laporan Penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan | | 5 laporan | 28.749.900 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 29 03 1.01 03 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah laporan Pengendalian dan pengawasan WIUP mineral bukan logam dan batuan | | 4 laporan | 34.797.400 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 29 01 1.02 | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah IUP Mineral logam dan batubara dalam daerah provinsi | | 65 IUP | 153.316.450 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 29 01 1.02 03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan IUP Mineral Logam dan Batubara | | | 55.880.000 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 29 01 1.02 04 | Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah | Jumlah Laporan pengawasan teknis kaidah pertambangan yang baik | | 5 laporan | 97.436.450 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 29 01 1.03 | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah IUP Mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi | | 50 IUP | 146.964.100 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 29 01 1.03 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat | Jumlah Laporan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan usulan WIUP | | 2 laporan | 34.299.400 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 29 01 1.03 05 | Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Pengawasan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan | | 20 lokasi | 112.664.700 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 29 01 1.04 | Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat | Jumlah IPR dalam wilayah provinsi | | 10 IPR | 65.356.800 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 29 01 1.04 01 | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat | Jumlah Dokumen Prosedur dan Persyaratan IPR | | 1 dok | 34.197.500 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 29 01 1.04 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat | Jumlah Laporan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan usulan WPR | | 2 lap | 31.159.300 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------|--|--|--------------------------|---------|--|---|--|--|---|--|--|----|--|--|
| | | | | Tahun 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | Rp | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | |
| 3 | 29 | 05 | | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN | Persentase pembangunan EBT | | | 4% | 4.760.603.125 | | | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng | | | | | | | | | | |
| 3 | 29 | 05 | 1.01 | Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan | Jumlah pemanfaatan langsung panas bumi yang telah memiliki izin dalam wilayah provinsi | | | 1 lokasi | 42.737.275 | | | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng | | | | | | | | | | |
| 3 | 29 | 5 | 1.01 | 01 | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan | Jumlah laporan inventarisasi potensi panas bumi | | 3 laporan | 42.737.275 | | | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng | | | | | | | | | | |
| 3 | 29 | 05 | 01.02 | | Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Usaha Jasa Penunjang EBT yang telah memiliki SKTUJP dalam wilayah provinsi | | 5 SKTUJP | 86.179.550 | | | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng | | | | | | | | | | |
| 3 | 29 | 05 | 1.02 | 01 | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah laporan hasil koordinasi penetapan prosedur dan persyaratan SKTUJP Pengusahaan EBT | | 4 laporan | 29.999.950 | | | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng | | | | | | | | | | |
| 3 | 29 | 05 | 1.02 | 02 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah rekomendasi izin dan informasi SKTUJP | | 2 rekomendasi | 44.999.950 | | | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng | | | | | | | | | | |
| 3 | 29 | 05 | 1.02 | 03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah perusahaan yang dibina terkait SKTUJP | | 2 perusahaan | 11.179.650 | | | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng | | | | | | | | | | |
| 3 | 29 | 05 | 1.03 | | Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun | Jumlah Perusahaan yang memiliki izin usaha niaga BBN | | 2 perusahaan | 32.369.650 | | | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng | | | | | | | | | | |
| 3 | 29 | 05 | 1.03 | 01 | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun | Jumlah laporan inventarisasi potensi BBN | | 2 laporan | 32.369.650 | | | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng | | | | | | | | | | |
| 3 | 29 | 05 | 1.04 | | Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi | Jumlah kelompok masyarakat yang telah menerapkan konservasi energi | | 6 kelompok masyarakat | 4.599.316.650 | | | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng | | | | | | | | | | |
| 3 | 29 | 05 | 1.04 | 01 | Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi | Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur EBT | | 1 dok | 57.000.000 | | | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng | | | | | | | | | | |
| 3 | 29 | 05 | 1.04 | 04 | Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi | Jumlah kapasitas terpasang dari infrastruktur EBT yang dibangun | | 29290 Watt | 4.475.840.050 | | | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng | | | | | | | | | | |
| 3 | 29 | 05 | 1.04 | 06 | Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi | Jumlah peserta bimbingan teknis konservasi energi | | 40 orang | 25.480.500 | | | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng | | | | | | | | | | |
| 3 | 29 | 05 | 1.04 | 07 | Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi | Jumlah dokumen evaluasi konservasi energi | | 2 dok | 40.996.100 | | | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng | | | | | | | | | | |
| 3 | 29 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | Rasio Elektrifikasi | | 98,84% | 1.949.546.525 | | | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng | | | | | | | | | | |
| 3 | 29 | 06 | 1.01 | | Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | Jumlah IUPTL Non BUMN yang terdaftar | | 1 IUPTL | 46.650.875 | | | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng | | | | | | | | | | |
| 3 | 29 | 06 | 1.01 | 01 | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Prosedur dan Persyaratan IUPTL | | 1 dok | 23.750.925 | | | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng | | | | | | | | | | |
| 3 | 29 | 06 | 1.01 | 03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan IUPTL | | 1 laporan | 22.899.950 | | | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng | | | | | | | | | | |
| 3 | 29 | 06 | 1.02 | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | Jumlah Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi | | 5 IO | 157.226.300 | | | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng | | | | | | | | | | |
| 3 | 29 | 06 | 1.02 | 01 | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi | | 1 dok | 18.665.675 | | | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng | | | | | | | | | | |
| 3 | 29 | 06 | 1.02 | 02 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Operasi | | 5 rekomendasi | 67.070.825 | | | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng | | | | | | | | | | |
| 3 | 29 | 06 | 1.02 | 03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Izin Operasi | | 6 Laporan | 71.489.800 | | | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng | | | | | | | | | | |

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------|
| | | | | Tahun 2022 | | | | | | |
| | | | | Target | Rp | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 3 | 29 | 06 | 1.04 | - Jumlah dokumen persetujuan harga jual tenaga listrik - Jumlah Dokumen Persetujuan RUPTL - Jumlah Dokumen Persetujuan Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemilik Izin Operasi | 1 dok 1 dok 1 dok | 66.552.425 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng | | |
| 3 | 29 | 06 | 1.04 | 01 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi | Jumlah laporan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi harga jual tenaga listrik, RUPTL dan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin | 1 laporan | 32.202.500 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 | 29 | 06 | 1.04 | 03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Harga Jual Tenaga Listrik, RUPTL, dan Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemilik IO | 3 laporan | 34.349.925 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 | 29 | 06 | 1.05 | | Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri | Jumlah IUJPTL badan usaha dalam negeri | 5 IUJPTL | 38.416.850 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 | 29 | 06 | 1.05 | 01 | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri | Jumlah Dokumen Penetapan Prosedur dan Persyaratan IUJPTL | 1 dok | 18.915.000 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 | 29 | 06 | 1.05 | 03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan IUJPTL | 1 laporan | 19.501.850 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 | 29 | 06 | 1.06 | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Persentase rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan sarana ketenagalistrikan | 1,63% | 1.640.700.075 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | 02 | Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | Jumlah calon Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | 660 RTS | 47.262.500 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan tenaga listrik | 50 orang | 87.389.600 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | 06 | Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Jumlah rumah tangga yang menerima bantuan penyediaan tenaga listrik | 660 RTS | 1.506.047.975 | Dinas ESDM Prov. Sulteng | Sulteng |

• UPT Laboratorium

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021) | Target Kinerja Program dan | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------|------|
| | | | | Tahun 2022 | | | | |
| | | | | Target | Rp | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| UPT LABORATORIUM | | | | | 209.999.860 | | | |
| 3 | 29 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Reformasi Birokrasi | | 64,5 | 159.078.485 | UPT LAB | Palu |
| 3 | 29 01 1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | | 81 | 9.657.175 | UPT LAB | Palu |
| 3 | 29 01 1.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA | | 1 dok | 1.699.775 | UPT LAB | Palu |
| 3 | 29 01 1.01 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA Perubahan | | 1 dok | 1.650.825 | UPT LAB | Palu |
| 3 | 29 01 1.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja | | 1 dok | 6.306.575 | UPT LAB | Palu |
| 3 | 29 01 1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa | | 4 laporan | 46.923.810 | UPT LAB | Palu |
| 3 | 29 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket pengadaan | | 2 paket | 18.049.050 | UPT LAB | Palu |
| 3 | 29 01 1.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket pengadaan | | 1 paket | 4.137.560 | UPT LAB | Palu |
| 3 | 29 01 1.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket pengadaan | | 1 paket | 3.300.000 | UPT LAB | Palu |
| 3 | 29 01 1.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi | | 1 laporan | 21.437.200 | UPT LAB | Palu |
| 3 | 29 01 1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | 1 laporan | 25.937.500 | UPT LAB | Palu |
| 3 | 29 01 1.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya | | 1 paket | 25.937.500 | UPT LAB | Palu |
| 3 | 29 01 1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | 3 laporan | 44.650.000 | UPT LAB | Palu |
| 3 | 29 01 1.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah pengiriman dokumen | | 20 paket | 880.000 | UPT LAB | Palu |
| 3 | 29 01 1.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | 12 bulan | 5.082.000 | UPT LAB | Palu |
| 3 | 29 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah paket pelayanan umum kantor | | 3 paket | 38.688.000 | UPT LAB | Palu |
| 3 | 29 01 1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | | 2 laporan | 31.910.000 | UPT LAB | Palu |
| 3 | 29 01 1.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah jasa | | 3 paket | 28.600.000 | UPT LAB | Palu |
| 3 | 29 01 1.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | | 1 paket | 3.310.000 | UPT LAB | Palu |
| 3 | 29 02 | Program Pengelolaan Aspek Geogeologian | Persentase Pemanfaatan Air Tanah Berbasis Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi | | 8,82% | 50.921.375 | UPT LAB | Palu |
| 3 | 29 02 1.02 | Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Jumlah perusahaan pengguna air tanah komersil yang telah memiliki izin | | 53 perusahaan | 50.921.375 | UPT LAB | Palu |
| 3 | 29 01 1.02 01 | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah | Jumlah Sampel Uji Air Tanah | | 3 sampel | 28.457.250 | UPT LAB | Palu |
| 3 | 29 01 1.02 03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pengeboran, penggalian, pemakaian dan pengusahaan air tanah | | 1 laporan | 22.464.125 | UPT LAB | Palu |

- Cabang Dinas ESDM Wilayah I

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|
| | | | | Target | Rp | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| CABANG DINAS ENEGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH I | | | | | 320.189.875 | | | | |
| 3 | 29 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Reformasi Birokrasi | 64,5 | 183.206.475 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol |
| 3 | 29 | 01 | 1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | 81 | 44.700.250 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol |
| 3 | 29 | 01 | 1.01 | 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA | 1 dok | 6.740.125 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol |
| 3 | 29 | 01 | 1.01 | 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA Perubahan | 1 dok | 6.140.125 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol |
| 3 | 29 | 01 | 1.01 | 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja | 1 dok | 31.820.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa | 5 laporan | 35.913.825 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket pengadaan | 1 paket | 1.096.123 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket pengadaan | 1 paket | 10.303.312 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket pengadaan | 1 paket | 1.820.140 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket pengadaan | 1 paket | 5.594.250 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi | 4 Laporan | 17.100.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol, Kota Palu |
| 3 | 29 | 01 | 1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 3 laporan | 54.442.400 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol |
| 3 | 29 | 01 | 1.08 | 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah pengiriman dokumen | 35 paket | 1.670.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol |
| 3 | 29 | 01 | 1.08 | 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 bulan | 14.084.400 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol |
| 3 | 29 | 01 | 1.08 | 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah paket pelayanan umum kantor | 1 paket | 38.688.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol |
| 3 | 29 | 01 | 1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 2 laporan | 48.150.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol |
| 3 | 29 | 01 | 1.09 | 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah jasa | 3 paket | 43.480.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol |
| 3 | 29 | 01 | 1.09 | 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 3 paket | 4.670.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol |
| 3 | 29 | 02 | | Program Pengelolaan Aspek Kegeologian | Persentase Pemanfaatan Air Tanah Berbasis Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi | 8,82% | 35.590.200 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol dan Tolitoli |
| 3 | 29 | 02 | 1.02 | Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Jumlah perusahaan pengguna air tanah komersil yang telah memiliki izin | 12 perusahaan | 16.509.200 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol dan Tolitoli |
| 3 | 29 | 01 | 1.02 | 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pengeboran, penggalian, pemakaian dan pengusahaan air tanah | 2 laporan | 16.509.200 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol dan Tolitoli |
| 3 | 29 | 01 | 1.03 | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Jumlah kabupaten/ kota yang telah ditetapkan NPA-nya | 1 kabupaten | 19.081.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol dan Tolitoli |
| 3 | 29 | 01 | 1.03 | 03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah | 1 laporan | 19.081.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol dan Tolitoli |
| 3 | 29 | 03 | | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | Persentase IUP yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik | 30% | 62.077.600 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol dan Tolitoli |
| 3 | 29 | 03 | 1.01 | Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah WIUP Mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan dalam daerah provinsi | 0 WIUP | 18.649.200 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol dan Tolitoli |
| 3 | 29 | 03 | 1.01 | 01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah laporan data dan informasi WIUP mineral bukan logam dan batuan | 2 laporan | 18.649.200 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol dan Tolitoli |

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | |
|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | | | Tahun 2022 | | | | |
| | | | | Target | Rp | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 3 | 29 01 1.03 | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah IUP Mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi | | 4 IUP | 16.839.200 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol dan Tolitoli |
| 3 | 29 01 1.03 04 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan | | 4 laporan | 16.839.200 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol dan Tolitoli |
| 3 | 29 01 1.07 | Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | Jumlah Kabupaten/Kota yang telah menerapkan Harga patokan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | | 1 Kabupaten | 26.589.200 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol dan Tolitoli |
| 3 | 29 01 1.07 01 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | Jumlah laporan data dan informasi harga patokan mineral bukan logam dan batuan | | 3 Laporan | 13.359.600 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol dan Tolitoli |
| 3 | 29 01 1.07 03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan | | 3 Laporan | 13.229.600 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol dan Tolitoli |
| 3 | 29 06 | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | Rasio Elektrifikasi | | 98,84% | 39.315.600 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol dan Tolitoli |
| 3 | 29 06 1.02 | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas instalasinya dalam Daerah Provinsi | Jumlah Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi | | 2 IO | 14.526.400 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol dan Tolitoli |
| 3 | 29 06 1.02 03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Izin Operasi | | 2 Laporan | 14.526.400 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol dan Tolitoli |
| 3 | 29 06 1.06 | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Persentase rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan sarana ketenagalistrikan | | 1,63% | 24.789.200 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol dan Tolitoli |
| 3 | 29 01 1.06 01 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | Jumlah Laporan data dan informasi penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu | | 7 Laporan | 24.789.200 | Cabang Dinas ESDM Wilayah I | Kab. Buol dan Tolitoli |

● Cabang Dinas ESDM Wilayah II

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | Target | Rp | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| CABANG DINAS ENEGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH II | | | | | 290.000.087 | | | |
| 3 | 29 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Reformasi Birokrasi | | 64,5 | 235.300.087 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso |
| 3 | 29 01 | 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | | 81 | 12.080.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso |
| 3 | 29 01 | 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA | | 1 dok | 560.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso |
| 3 | 29 01 | 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja | | 1 dok | 11.520.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso |
| 3 | 29 01 | 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa | | 5 laporan | 72.231.087 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso |
| 3 | 29 01 | 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket pengadaan | | 1 paket | 891.587 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso |
| 3 | 29 01 | 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket pengadaan | | 2 paket | 45.273.130 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso |
| 3 | 29 01 | 1.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket pengadaan | | 1 paket | 703.670 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso |
| 3 | 29 01 | 1.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket pengadaan | | 1 paket | 2.202.700 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso |
| 3 | 29 01 | 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi | | 4 laporan | 23.160.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso, Kota Palu |
| 3 | 29 01 | 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | 1 Laporan | 38.500.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso |
| 3 | 29 01 | 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya | | 1 paket | 38.500.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso |
| 3 | 29 01 | 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | 3 Laporan | 70.016.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso |
| 3 | 29 01 | 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah pengiriman dokumen | | 20 paket | 1.100.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso |
| 3 | 29 01 | 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | 12 bulan | 33.516.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso |
| 3 | 29 01 | 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah paket pelayanan umum kantor | | 1 paket | 35.400.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso |
| 3 | 29 01 | 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | | 2 Laporan | 42.473.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso |
| 3 | 29 01 | 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah jasa | | 3 paket | 37.803.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso |
| 3 | 29 01 | 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | | 3 paket | 4.670.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso |
| 3 | 29 02 | Program Pengelolaan Aspek Geولوجian | Persentase Pemanfaatan Air Tanah Berbasis Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi | | 8,82% | 12.580.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso dan Touna |
| 3 | 29 02 | 1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Jumlah perusahaan pengguna air tanah komersil yang telah memiliki izin | | 12 perusahaan | 6.040.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso dan Touna |
| 3 | 29 01 | 1.02 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pengeboran, penggalian, pemakaian dan pengusahaan air tanah | | 1 Laporan | 6.040.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso dan Touna |
| 3 | 29 01 | 1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Jumlah kabupaten/ kota yang telah ditetapkan NPA-nya | | 1 Kab | 6.540.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso dan Touna |
| 3 | 29 01 | 1.03 03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah | | 1 Laporan | 6.540.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso dan Touna |

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------------------|
| | | | | Target | Rp | | |
| 3 29 03 | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | Persentase IUP yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik | | 30% | 28.325.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso dan Touna |
| 3 29 03 1.01 | Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah WIUP Mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan dalam daerah provinsi | | 0 WIUP | 6.605.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso dan Touna |
| 3 29 03 1.01 01 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah laporan data dan informasi WIUP mineral bukan logam dan batuan | | 5 Laporan | 6.605.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso dan Touna |
| 3 29 01 1.03 | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah IUP Mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi | | 12 IUP | 8.630.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso dan Touna |
| 3 29 01 1.03 04 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan | | 1 Laporan | 8.630.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso dan Touna |
| 3 29 01 1.07 | Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | Jumlah Kabupaten/Kota yang telah menerapkan Harga patokan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | | 1 Kab | 13.090.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso dan Touna |
| 3 29 01 1.07 01 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | Jumlah laporan data dan informasi harga patokan mineral bukan logam dan batuan | | 2 Laporan | 7.050.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso dan Touna |
| 3 29 01 1.07 03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan | | 1 Laporan | 6.040.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso dan Touna |
| 3 29 06 | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | Rasio Elektrifikasi | | 98,84% | 13.795.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso dan Touna |
| 3 29 06 1.02 | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | Jumlah Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi | | 2 IO | 4.480.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso dan Touna |
| 3 29 06 1.02 03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Izin Operasi | | 1 Laporan | 4.480.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso dan Touna |
| 3 29 06 1.06 | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Persentase rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan sarana ketenagalistrikan | | 1,63% | 9.315.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso dan Touna |
| 3 29 01 1.06 01 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | Jumlah Laporan data dan informasi penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu | | 1 Laporan | 4.480.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso dan Touna |
| 3 29 01 1.06 07 | Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan | | 2 Laporan | 4.835.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah II | Kab. Poso dan Touna |

- Cabang Dinas ESDM Wilayah III

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | | | Target | Rp | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| CABANG DINAS ENEGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH III | | | | | | 369.816.163 | | |
| 3 | 29 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Reformasi Birokrasi | | 64,5 | 237.296.163 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali |
| 3 | 29 01 1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | | 81 | 2.970.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali |
| 3 | 29 01 1.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA | | 1 dok | 990.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali |
| 3 | 29 01 1.01 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA Perubahan | | 1 dok | 990.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali |
| 3 | 29 01 1.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja | | 1 dok | 990.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali |
| 3 | 29 01 1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa | | 5 laporan | 51.138.511 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali |
| 3 | 29 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket pengadaan | | 1 paket | 698.471 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali |
| 3 | 29 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket pengadaan | | 1 paket | 9.743.150 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali |
| 3 | 29 01 1.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket pengadaan | | 1 paket | 2.142.190 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali |
| 3 | 29 01 1.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket pengadaan | | 1 paket | 304.700 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali |
| 3 | 29 01 1.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi | | 4 laporan | 38.250.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali, Kota Palu |
| 3 | 29 01 1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | 1 laporan | 50.750.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali |
| 3 | 29 01 1.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya | | 1 paket | 50.750.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali |
| 3 | 29 01 1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | 3 laporan | 101.487.652 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali |
| 3 | 29 01 1.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah pengiriman dokumen | | 50 paket | 550.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali |
| 3 | 29 01 1.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | 12 bulan | 15.249.652 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali |
| 3 | 29 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah paket pelayanan umum kantor | | 1 paket | 85.688.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali |
| 3 | 29 01 1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | | 1 Laporan | 30.950.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali |
| 3 | 29 01 1.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah jasa | | 3 paket | 30.950.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali |
| 3 | 29 02 | Program Pengelolaan Aspek Gegeologian | Persentase Pemanfaatan Air Tanah Berbasis Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi | | 8,82% | 46.500.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali dan Morut |
| 3 | 29 02 1.02 | Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Jumlah perusahaan pengguna air tanah komersil yang telah memiliki izin | | 12 perusahaan | 24.610.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali dan Morut |
| 3 | 29 01 1.02 03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pengeboran, penggalian, pemakaian dan pengusahaan air tanah | | 8 laporan | 24.610.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali dan Morut |
| 3 | 29 01 1.03 | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Jumlah kabupaten/ kota yang telah ditetapkan NPA-nya | | 1 kab | 21.890.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali dan Morut |
| 3 | 29 01 1.03 03 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah | | 8 laporan | 21.890.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali dan Morut |

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | | | | | |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|-------------------------------|-------------------------|
| | | | | Tahun 2022 | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | Rp | | | | | | | | | |
| 3 | 29 | 03 | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | Persentase IUP yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik | | 30% | 48.560.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali dan Morut |
| 3 | 29 | 03 | 1.01 | | | | | Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah WIUP Mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan dalam daerah provinsi | | 0 WIUP | 16.625.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali dan Morut |
| 3 | 29 | 03 | 1.01 | 01 | | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah laporan data dan informasi WIUP mineral bukan logam dan batuan | | 6 Laporan | 16.625.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali dan Morut |
| 3 | 29 | 01 | 1.03 | | | | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah IUP Mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi | | 12 IUP | 15.325.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali dan Morut |
| 3 | 29 | 01 | 1.03 | 04 | | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan | | 8 Laporan | 15.325.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali dan Morut |
| 3 | 29 | 01 | 1.07 | | | | | Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | Jumlah Kabupaten/Kota yang telah menerapkan Harga patokan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | | 1 kab | 16.610.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali dan Morut |
| 3 | 29 | 01 | 1.07 | 01 | | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | Jumlah laporan data dan informasi harga patokan mineral bukan logam dan batuan | | 8 laporan | 7.610.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali dan Morut |
| 3 | 29 | 01 | 1.07 | 03 | | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan | | 8 laporan | 9.000.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali dan Morut |
| 3 | 29 | 06 | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | Rasio elektrifikasi | | 98,84% | 37.460.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali dan Morut |
| 3 | 29 | 06 | 1.02 | | | | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | Jumlah Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi | | 2 IO | 17.460.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali dan Morut |
| 3 | 29 | 06 | 1.02 | 03 | | | | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Izin Operasi | | 8 Laporan | 17.460.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali dan Morut |
| 3 | 29 | 06 | 1.06 | | | | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Persentase rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan sarana ketenagalistrikan | | 1,63% | 20.000.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali dan Morut |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | 01 | | | | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | Jumlah Laporan data dan informasi penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu | | 5 Laporan | 20.000.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali dan Morut |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | 07 | | | | Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan | | - | - | Cabang Dinas ESDM Wilayah III | Kab. Morowali dan Morut |

- Cabang Dinas ESDM Wilayah IV

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | Tahun 2022 | | | | |
| | | | | Target | Rp | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| CABANG DINAS ENEGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH IV | | | | | | | | |
| 3 | 29 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Reformasi Birokrasi | | 64,5 | 292.285.689 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai |
| 3 | 29 01 1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | | 81 | 21.465.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai |
| 3 | 29 01 1.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA | | 1 dok | 10.182.500 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai |
| 3 | 29 01 1.01 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA Perubahan | | 1 dok | 10.182.500 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai |
| 3 | 29 01 1.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja | | 1 dok | 1.100.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai |
| 3 | 29 01 1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa | | 5 laporan | 100.802.249 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai |
| 3 | 29 01 1.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket pengadaan | | 1 paket | 1.323.519 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai |
| 3 | 29 01 1.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket pengadaan | | 1 paket | 11.009.250 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai |
| 3 | 29 01 1.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket pengadaan | | 1 paket | 1.966.480 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai |
| 3 | 29 01 1.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket pengadaan | | 1 paket | 4.203.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai |
| 3 | 29 01 1.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi | | 4 Laporan | 82.300.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai, Kota Palu |
| 3 | 29 01 1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | | 1 laporan | 9.487.500 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai |
| 3 | 29 01 1.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya | | 1 paket | 9.487.500 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai |
| 3 | 29 01 1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | | 3 Laporan | 99.756.040 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai |
| 3 | 29 01 1.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah pengiriman dokumen | | 50 paket | 2.025.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai |
| 3 | 29 01 1.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | 12 bulan | 26.355.040 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai |
| 3 | 29 01 1.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah paket pelayanan umum kantor | | 1 paket | 71.376.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai |
| 3 | 29 01 1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | | 3 laporan | 60.774.900 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai |
| 3 | 29 01 1.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah jasa | | 1 paket | 3.434.900 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai |
| 3 | 29 01 1.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah jasa | | 2 paket | 51.250.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai |
| 3 | 29 01 1.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | | 1 paket | 6.090.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai |
| 3 | 29 02 | Program Pengelolaan Aspek Geologi | Persentase Pemanfaatan Air Tanah Berbasis Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi | | 8,82% | 11.322.375 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai, Bangkep, Balut |
| 3 | 29 02 1.02 | Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Jumlah perusahaan pengguna air tanah komersil yang telah memiliki izin | | 12 perusahaan | 7.280.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai, Bangkep, Balut |
| 3 | 29 01 1.02 03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pengeboran, penggalian, pemakaian dan pengusahaan air tanah | | 2 Laporan | 7.280.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai, Bangkep, Balut |

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | | |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | Target | Rp | | | | | |
| | | | | 3 | 29 | | | 01 | 1.03 | |
| | | | | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Jumlah kabupaten/ kota yang telah ditetapkan NPA-nya | 1 Kab | 4.042.375 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai, Bangkep, Balut | |
| 3 | 29 | 01 | 1.03 | 03 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah | 1 Laporan | 4.042.375 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai, Bangkep, Balut |
| 3 | 29 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | Persentase IUP yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik | 30% | 24.200.025 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai, Bangkep, Balut |
| 3 | 29 | 01 | 1.03 | | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah IUP Mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi | 10 IUP | 24.200.025 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai, Bangkep, Balut |
| 3 | 29 | 01 | 1.03 | 04 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan | 2 Laporan | 24.200.025 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai, Bangkep, Balut |
| 3 | 29 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | Rasio Elektrifikasi | 98,84% | 61.536.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai, Bangkep, Balut |
| 3 | 29 | 06 | 1.02 | | Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | Jumlah Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi | 2 IO | 7.340.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai, Bangkep, Balut |
| 3 | 29 | 06 | 1.02 | 03 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Izin Operasi | 2 Laporan | 7.340.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai, Bangkep, Balut |
| 3 | 29 | 06 | 1.06 | | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Persentase rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan sarana ketenagalistrikan | 1,63% | 54.196.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai, Bangkep, Balut |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | 01 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | Jumlah Laporan data dan informasi penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu | 1 Laporan | 42.486.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai, Bangkep, Balut |
| 3 | 29 | 01 | 1.06 | 07 | Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan | 1 Laporan | 11.710.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah IV | Kab. Banggai, Bangkep, Balut |

• Cabang Dinas ESDM Wilayah V

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| | | | | Tahun 2022 | | | | | |
| | | | | Target | Rp | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| CABANG DINAS ENEGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH V | | | | | | 290.563.504 | | | |
| 3 | 29 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Indeks Reformasi Birokrasi | | 64,5 | 214.591.554 | Cabang Dinas ESDM Wilayah V | Kab. Sigi | |
| 3 | 29 01 | 1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | 81 | 12.232.150 | Cabang Dinas ESDM Wilayah V | Kab. Sigi | |
| 3 | 29 01 | 1.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA | 1 dok | 3.501.500 | Cabang Dinas ESDM Wilayah V | Kab. Sigi |
| 3 | 29 01 | 1.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA Perubahan | 1 dok | 1.898.150 | Cabang Dinas ESDM Wilayah V | Kab. Sigi |
| 3 | 29 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja | 1 dok | 6.832.500 | Cabang Dinas ESDM Wilayah V | Kab. Sigi |
| 3 | 29 01 | 1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa | 5 laporan | 38.649.804 | Cabang Dinas ESDM Wilayah V | Kab. Sigi | |
| 3 | 29 01 | 1.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket pengadaan | 1 paket | 737.179 | Cabang Dinas ESDM Wilayah V | Kab. Sigi |
| 3 | 29 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket pengadaan | 1 paket | 21.195.400 | Cabang Dinas ESDM Wilayah V | Kab. Sigi |
| 3 | 29 01 | 1.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket pengadaan | 1 paket | 2.016.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah V | Kab. Sigi |
| 3 | 29 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket pengadaan | 1 paket | 4.471.225 | Cabang Dinas ESDM Wilayah V | Kab. Sigi |
| 3 | 29 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi | 1 laporan | 10.230.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah V | Kab. Sigi, Kota Palu |
| 3 | 29 01 | 1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 3 laporan | 119.359.600 | Cabang Dinas ESDM Wilayah V | Kab. Sigi | |
| 3 | 29 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah pengiriman dokumen | 20 paket | 1.100.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah V | Kab. Sigi |
| 3 | 29 01 | 1.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 bulan | 29.571.600 | Cabang Dinas ESDM Wilayah V | Kab. Sigi |
| 3 | 29 01 | 1.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah paket pelayanan umum kantor | 2 paket | 88.688.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah V | Kab. Sigi |
| 3 | 29 01 | 1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 2 laporan | 44.350.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah V | Kab. Sigi | |
| 3 | 29 01 | 1.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah jasa | 2 paket | 41.100.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah V | Kab. Sigi |
| 3 | 29 01 | 1.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 1 paket | 3.250.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah V | Kab. Sigi |
| 3 | 29 02 | | Program Pengelolaan Aspek Geologi | Persentase Pemanfaatan Air Tanah Berbasis Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi | 8,82% | 13.925.575 | Cabang Dinas ESDM Wilayah V | Kab. Sigi, Kota Palu | |
| 3 | 29 01 | 1.03 | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Jumlah kabupaten/ kota yang telah ditetapkan NPA-nya | 1 Kab | 13.925.575 | Cabang Dinas ESDM Wilayah V | Kab. Sigi, Donggala, Parimo, Kota Palu | |
| 3 | 29 01 | 1.03 | 03 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah | 4 laporan | 13.925.575 | Cabang Dinas ESDM Wilayah V | Kab. Sigi, Donggala, Parimo, Kota Palu |

| Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| | | | | Tahun 2022 | | | |
| | | | | Target | Rp | | |
| 3 29 03 | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | Persentase IUP yang telah menerapkan kaidah pertambangan yang baik | | 30% | 28.316.250 | Cabang Dinas ESDM Wilayah V | Kab. Sigi, Donggala, Parimo, Kota Palu |
| 3 29 01 1.03 | Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mii Laut | Jumlah IUP Mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi | | 12 IUP | 16.261.250 | Cabang Dinas ESDM Wilayah V | Kab. Sigi, Donggala, Parimo, Kota Palu |
| 3 29 01 1.03 04 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mii Laut | Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan | | 3 Laporan | 16.261.250 | Cabang Dinas ESDM Wilayah V | Kab. Sigi, Donggala, Parimo, Kota Palu |
| 3 29 01 1.07 | Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | Jumlah Kabupaten/Kota yang telah menerapkan Harga patokan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | | 1 Kab | 12.055.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah V | Kab. Sigi, Donggala, Parimo, Kota Palu |
| 3 29 01 1.07 01 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan | Jumlah laporan data dan informasi harga patokan mineral bukan logam dan batuan | | 3 Laporan | 12.055.000 | Cabang Dinas ESDM Wilayah V | Kab. Sigi, Donggala, Parimo, Kota Palu |
| 3 29 06 | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | Rasio elektrifikasi | | 98,84% | 33.730.125 | Cabang Dinas ESDM Wilayah V | Kab. Sigi, Donggala, Parimo, Kota Palu |
| 3 29 06 1.06 | Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan | Persentase rumah tangga tidak mampu yang menerima bantuan sarana ketenagalistrikan | | 1,63% | 33.730.125 | Cabang Dinas ESDM Wilayah V | Kab. Sigi, Donggala, Parimo, Kota Palu |
| 3 29 01 1.06 01 | Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu | Jumlah Laporan data dan informasi penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu | | 4 Laporan | 33.730.125 | Cabang Dinas ESDM Wilayah V | Kab. Sigi, Donggala, Parimo, Kota Palu |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 di lingkup Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2022.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah.

Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program dan kegiatan tetap memperhatikan keterpaduan antar kegiatan, antar program dalam satu instansi maupun antar instansi dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat dan provinsi dengan mempedomani peraturan – peraturan yang berlaku.

Adapun rencana tindak lanjut dari perencanaan kerja Dinas ESDM yaitu:

- Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang ditempuh dapat melalui Pendidikan formal maupun informal yang dapat menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- Penerapan system *reward* and *punishment* terhadap seluruh pegawai dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
- Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif dalam melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar proses pembangunan dapat menjadi lebih berdaya guna dan berhasil guna.

- Meningkatkan peran *stakeholder* baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran sehingga transparansi akan lebih terwujud.